

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

3.1.4 Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Belanja merupakan pengeluaran daerah maksudnya setiap uang yang keluar dari kas daerah. Oleh karena itu, dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja daerah, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut ini dijelaskan masing-masing pengertian dari jenis-jenis belanja di atas:

1. Belanja tidak langsung

Adalah belanja yang yang tidak berkenaan atau tidak dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan atau program-program. Kelompok belanja tidak langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja pegawai kompensasi
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial

- f. Belanja bagi hasil
 - g. Belanja bantuan keuangan
 - h. Belanja tidak terduga
2. Belanja Langsung

Yaitu belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok belanja langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja pegawai honorarium
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Aktivitas instansi pemerintah pada umumnya melakukan kegiatan belanja. Belanja merupakan suatu kegiatan yang dianggap penting dalam instansi pemerintah karena itulah instansi mendapat persediaan barang/peralatan/perlengkapan untuk aktivitas dalam instansi pemerintah.

Menurut Halim (2004), “Belanja Modal merupakan belanja pemeliharaan daerah yang manfaatnya melebihi tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”.

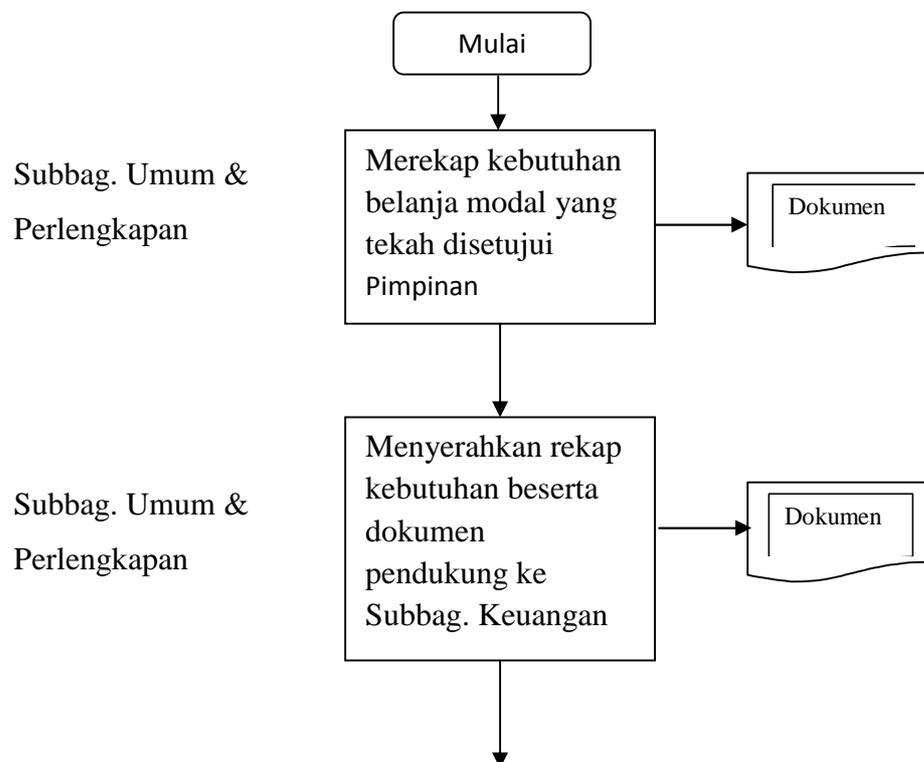
Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBD/APBN. “Belanja Modal adalah belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan” (Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:169). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan pengertian pengelolaan dan belanja modal di atas, pengelolaan belanja modal dapat diidentifikasi sebagai rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan bahwa belanja terjadi dikarenakan menggunakan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas.

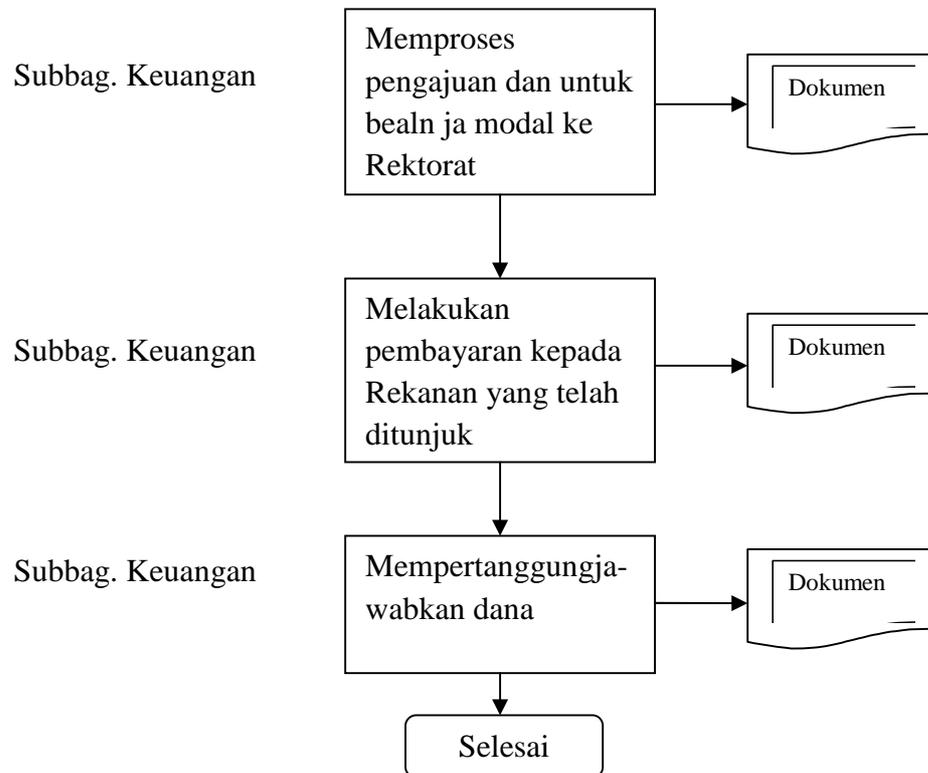
Gambar 3.3

Bagan alir pencarian dana belanja Modal



Gambar 3.3

Bagan alir pencarian dana belanja Modal (Lanjutan)



3.1.5 Jenis-jenis Belanja Modal

Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah.

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan

ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Halim (2004: 73) mengemukakan belanja modal sendiri terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

Dari kedua pendapat diatas perbedaanya terletak pada jenis Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) dalam PMK No. 101/PMK.02/2011 dijelaskan tentang Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) sedangkan menurut Halim (2004:73) jenis belanja modal hanya ada lima yang dikategorikan utama.

3.1.6 Kriteria Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap (Mursyidi, 2009:305).

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut :

1. Berwujud
2. akan menambah aset pemerintah
3. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
4. nilainya relatif material.

Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah:

1. tidak berwujud
2. akan menambah aset pemerintah
3. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
4. nilainya relatif material.

Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (treshold capitalization), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan / atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan

belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset menurut PMK No. 101/PMK.02/2011:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayangnya tidak dijelaskan bagaimana cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual.

3.1.7 Komponen Biaya Belanja Modal

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional. Tentu harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut. Di samping Belanja Modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.

Tabel 3.1.

Jenis komponen biaya yang dimungkinkan didalam belanja modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pembebasan Tanah • Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah • Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah • Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah • Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

<p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya • Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya • Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

3.1.8 Jurnal Standar Belanja Modal

Contoh Jurnal:

Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

<i>Belanja Modal Tanah</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang dari KUN</i>		<i>xxx</i>

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap

<i>Tanah sebelum disesuaikan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Diinvestasikan dalam Aset Tetap</i>		<i>xxx</i>

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang dari KUN</i>		<i>xxx</i>

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap

<i>Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Diinvestasikan dalam Aset Tetap</i>		<i>xxx</i>

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang dari KUN</i>		<i>xxx</i>

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap

<i>Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Diinvestasikan dalam Aset</i>		<i>xxx</i>

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang dari KUN</i>		<i>xxx</i>

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya xxx

Piutang dari KUN xxx

Tidak diikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap, tetapi akan dilakukan melalui Jurnal Aset sesuai dengan aset yang dihasilkan.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pelaporan Keuangan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Pada dasarnya setiap instansi pemerintah diberikan anggaran untuk mengelola setiap kebutuhan yang diperlukan. Dalam praktiknya, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh selama satu periode pelaporan maka disusunlah laporan keuangan yang digunakan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Kebijakan Keuangan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan Keuangan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pemerintahan dan bidang fisik-infrastruktur. Kebijakan bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial. Kebijakan bidang fisik dan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan pada Rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah,

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan pelayanan arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat, Untuk menunjang tugas pokok Badan arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 14 Program dan 77 Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 49.220.225.000,- yang terbagi menjadi Belanja Langsung Rp 27.433.889.000 dan Belanja Tidak Langsung Rp

21.786.366.000,- sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2015.

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015, didukung dengan Anggaran sebesar Rp.49.838.280.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp.49.220.225.000,- dan APBN sebesar Rp. 618,055,000,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 28.600.076.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.15.626.257.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp.4.993.892.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran seperti Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penggunaan Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.024.886.000	4.789.205.620	95.31
Meningkatnya sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.442.357.000	5.661.339.450	87.88
Meningkatnya disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110.058.000	105.800.000	96.13

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	70.000.000	100
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	323.000.000	294.693.200	91.24
Tersusunnya perda tentang kearsipan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000	189.861.860	80.79
Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.466.972.000	1.410.427.372	96.15
Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.217.672.000	1.196.118.424	98.23
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	400.000.000	375.538.560	93.88
Meningkatkan layanan pada masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	125.000.000	119.193.450	95.35
Meningkatnya budaya masyarakat Jawa Tengah	Program Pengembangan Budaya Baca	1.447.600.000	1.315.310.085	90.86
Meningkatnya SDM	Program Peningkatan	336.010.000	283.482.678	84.37

perpustakaan	SDM Perpustakaan			
Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	3.760.260.000	3.487.375.832	92.74
Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	827.521.000	797.695.661	96.40

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 1.83%, Tahun 2015 sebesar 92.87%, Tahun 2014 sebesar 94.04%.

3.2.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Belanja Modal Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokkan sesuai proporsi belanja sebagai mana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

PROPORSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasional	44.226.333.000	41.280.691.140	93.34
2	Belanja Modal	4.993.892.000	4.429.872.450	88.71

	Jumlah Belanja Daerah	49.220.225.000	45.710.563.590	92.87
--	------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Pada tabel diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Realisasi Belanja Daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp 45.710.563.590,- atau 92.87% dari anggaran sebesar Rp 49.220.225.000,- realisasi belanja terdiri dari: Belanja Operasional sebesar Rp 41.280.691.140,- atau 93.34%, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 4.429.872.450,- atau 88.71%.

Capaian Target Kinerja Belanja Modal.

Tabel 3.4

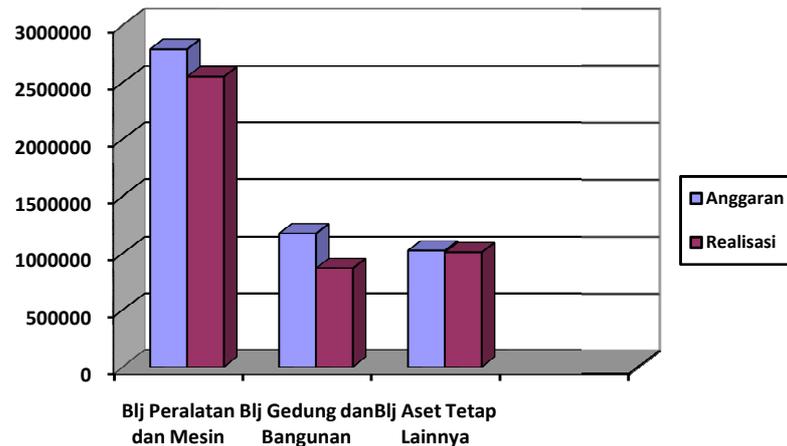
Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	2.794.850.000	2.552.266.650	91.32
Belanja Gedung dan Bangunan	1.174.792.000	868.685.800	73.94
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.024.250.000	1.008.920.000	98.50
Jumlah	4.993.892.000	4.429.872.450	88.71

Gambar 3.4

Pencapaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2015

(dalam ribuan rupiah)



Gambar diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Realisasi sebesar Rp 4.429.872.450,- atau 88.71% dari Anggaran sebesar Rp 4.993.892.000,- sedangkan untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar Rp 2.833.071.500,- atau 93.09% dari anggaran sebesar Rp 3.043.322.000,-
- b. Capaian Kinerja Belanja Gedung dan Bangunan Realisasi sebesar Rp 992.090.200,- atau 82.67% dari anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,-
- c. Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar Rp 11.575.300,- atau 55.12% dari anggaran sebesar Rp 21.000.000,-

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2014 dan 2015

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA2014	TA2015	Rp	%
1	Belanja Tanah				
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.833.071.500	2.552.266.650	(280.804.850)	(9.91)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	992.090.200	868.685.800	(123.404.400)	(12.44)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.575.300	1.008.920.000	997.344.700	8.616.15
	Jumlah	3.836.737.000	4.429.872.450	593.135.450	15.46

Tabel 3.5 Adalah Perbandingan Capaian kinerja belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dengan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan sebesar 9.91% atau sebesar Rp 280.804.850,-.
- b. Capaian Kinerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan sebesar 12.41% atau sebesar Rp 123.404.400,-.
- c. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada kenaikan sebesar 8.616.15% atau sebesar Rp. 997.344.700,-.

3.2.5 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja SKPD dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Aspek perundangan yang berganti-ganti yang mengakibatkan pelaksanaan jadi lambat karena perlu penyesuaian dengan perundangan yang baru.
2. Pencatatan belanja modal yang menjadi asset dan harus dicatat pada Buku Inventaris Barang dan Neraca, masih ada perbedaan antara catatan akuntansi dan buku inventaris barang disebabkan sumber peraturan perundang-undangan juga berbeda.
3. Pengelolaan aset dan penghapusan aset, untuk proses penghapusan aset rusak maupun yang dihibahkan prosesnya terlalu lama dan penyampaiannya kadang terlambat,

Beberapa langkah solusi dalam mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan yang akan datang lebih diprioritas/fokus pada isu-isu lingkungan dalam penyusunan anggaran kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian/mencermati secara cepat terhadap perubahan perundangan yang baru.
3. Melakukan rapat pengendalian dan evaluasi kegiatan setiap bulanan
4. Meminta laporan bulanan pelaksanaan kegiatan baik laporan Keuangan maupun fisik.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring lapangan secara periodik.
6. Melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi baru.
7. Melakukan penyusunan usulan perubahan anggaran apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor perencanaan dan perundangan baru.
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kab/Kota, LSM, Kelompok Masyarakat di daerah dalam pelaksanaan kegiatan

9. Mengusulkan terus menerus kepada DPPAD Prov Jateng aset yang sudah diserahkan kepada masyarakat dan aset yang sudah rusak berat untuk segera dihapus.

Ikhitisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 21.786.336.000,- realisasi Rp 20.096.042.192,- atau 92.24% yang terdiri dari 14 program dan 77 kegiatan.

3.2.6 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Posisi Neraca untuk Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 59.800.515.965,- sedangkan mutasi masuk/tambah aset tahun 2015 sebesar Rp 5.451.160.018,- dan mutasi masuk/tambah aset tahun 2015 sebesar Rp 1.666.049.934,- sehingga posisi Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp 63.585.626.049,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rincian Pos-pos Belanja Modal.

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	26.993.731.522,00	25.179.551.373,00
3	R Gedung dan Bangunan i	22.436.404.317,00	21.607.670.382,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan n	196.700.000,00	196.700.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.279.014.210,00	8.270.094.210,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.276.000,00	
	Jumlah	63.585.626.049,00	59.800.515.965,00

dan Mutasi Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 3.7

Mutasi Aset Tetap

Saldo per 31 Desember 2014		59.800.515.965,00
Mutasi Masuk/Penambahan tahun 2015		
Mutasi Masuk		
Reklasifikasi	1.021.287.568,00	
Belanja Modal	4.429.872.450,00	
Kapitalisasi Non Belanja Modal		
Jumlah	5.451.160.018,00	
Mutasi Keluar/Pengurangan tahun 2015		
Hibah Barang /Jasa yang diserahkan Masyarakat		
Mutasi Keluar		
Penghapusan		
Reklasifikasi	1.021.287.568,00	
Ekstrakontable	33.205.566,00	
Aset Lainnya	611.556.800,00	
Jumlah	1.666.049.934,00	
Jumlah penambahan selama TA 2015		3.785.110.084,00
Saldo per 31 Desember 2015		63.585.626.049,00

Tabel 3.8

Nilai Tanah per 31 Desember 2015

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00

Nilai tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 4.546.500.000,- Mutasi Masuk dan Keluar tahun 2015 sebesar Rp 0,- sehingga Nilai Tanah per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp 4.546.500.000,-.

Tabel 3.9

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015.

No	Uraian	2015	2014
1	Peralatan dan Mesin	26.993.731.522	25.179.551.373
Dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :			
No	Uraian	2015	2014
a	Alat Berat	4.065.823.260,00	3.744.423.260,00
b	Alat angkut Darat Bermotor	3.879.024.111,00	3.287.067.411,00
c	Alat-alat Bengkel	112.499.000,00	92.719.000,00
d	Alat-alat Pertanian/Peternakan	3.148.000,00	3.148.000,00
e	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	17.497.105.630,00	16.656.699.614,00
f	Alat Studio dan Komunikasi	1.340.711.162,00	1.300.073.729,00
g	Alat-alat Kedokteran	-	-
h	Alat Laboratorium	95.420.359,00	95.420.359,00
	Jumlah	26.993.731.522,00	25.179.551.373,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp 25.179.551.373,- dan pada tahun 2015 bertambah sebesar Rp 3.346.954.083,- dan berkurang sebesar Rp 1.532.773.934,- sehingga nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 26.993.731.522,- untuk mutasi masuk/penambahan selama Tahun Anggaran 2015 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.10

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2014		25.179.551.373,00
Mutasi Masuk / Penambahan tahun 2015		
Mutasi Masuk		
Belanja Modal :		
'- Alat Angkut bermotor	753.513.500,00	
.- Alat Bengkel	19.780.000,00	
- Peralatan Kantor,Perlengkapan Kantor dan RT	1.761.623.150,00	
- Alat Studio dan Komunikasi	17.350.000,00	
Reklasifikasi :		
- Alat -alat Besar	771.400.000,00	
- Alat Studio dan Komunikasi	23.287.433,00	
Kapitalisasi Non Belanja Modal		
Jumlah	3.346.954.083,00	
Mutasi Keluar / Pengurangan tahun 2015		
Mutasi Keluar		
Reklasifikasi :		
- Alat-alat Besar	450.000.000,00	
- Alat-Alat Angkut	161.556.800,00	
- Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga	888.011.568,00	
Ekstracomtable :		
,- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	33.205.566,00	

Penghapusan		
Jumlah	1.532.773.934,00	
Jumlah penambahan selama TA 2015		1.814.180.149,00
Saldo per 31 Desember 2015		26.993.731.522,00

Tabel 3.11

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015.

No	Uraian	2015	2014
1	Gedung dan Bangunan	22.436.404.317,00	21.607.670.382,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 21.607.670.382,- sedangkan tahun 2015 mutasi masuk dari Belanja Modal sebesar Rp 962.009.935,- dan mutasi keluar sebesar Rp 133.276.000,- sehingga Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 22.436.404.317,-.

Tabel 3.12

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2014		21.607.670.382,00
Mutasi Masuk / Penambahan tahun 2015		
Mutasi Masuk		
Belanja Modal :		
‘- Pembangunan Peningkatan rumah genset, pelapis atap depo, Parkir & pagar	868.685.800,00	

Reklasifikasi :		
'- Interior Loby (Alat Kantor dan rumah tangga)	93.324.135,00	
Jumlah	962.009.935,00	
Mutasi Keluar / Pengurangan tahun 2015		
Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Masyarakat		
Mutasi Keluar		
Reklasifikasi	133.276.000,00	
Penghapusan		
Jumlah	133.276.000,00	
Jumlah penambahan selama TA 2015		828.733.935,00
Saldo per 31 Desember 2015		22.436.404.317,00

Tabel 3.13

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015.

No	Uraian	2015	2014
1	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	196.700.000,00	196.700.000,00

Nilai asset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 196.700.000,- sedangkan mutasi masuk dan keluar sebesar Rp 0,- sehingga nilai asset tersebut per 31 Desember 2015 sebesar Rp 196.700.000,- .

Tabel 3.14

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015.

No	Uraian	2015	2014
1	Buku Perpustakaan	9.279.014.210,00	8.270.094.210,00

Tabel 3.15

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2014		8.270.094.210,00
Mutasi Masuk / Penambahan tahun 2015		
Hibah		
Mutasi Masuk		
Belanja Modal	1.008.920.000,00	
Kapitalisasi Non Belanja Modal		
Jumlah	1.008.920.000,00	
Mutasi Keluar / Pengurangan tahun 2015		
Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Masyarakat		
Mutasi Keluar		
Penghapusan		
Jumlah		
Jumlah penambahan selama TA 2015		1.008.920.000,00
Saldo per 31 Desember 2015		9.279.014.210,00

Nilai Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp 1.008.920.210,- yaitu pengadaan buku perpustakaan sebanyak 20.926 buku, sehingga nilai

asset buku menjadi sebesar Rp 9.279.014.210,- per 31 Desember 2015.

Tabel 3.16

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015.

No	Uraian	2015	2014
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan DED	133.276.000.00	

Tabel 3.17

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2014		
Mutasi Masuk / Penambahan tahun 2015		
Hibah		
Mutasi Masuk	133.276.000,00	
Belanja Modal		
Kapitalisasi Non Belanja Modal		
Jumlah	133.276.000,00	
Mutasi Keluar / Pengurangan tahun 2015		
Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Masyarakat		
Mutasi Keluar		
Penghapusan		
Jumlah		
Jumlah penambahan selama TA 2015		133.276.000,00
Saldo per 31 Desember 2015		133.276.000,00

Tabel 3.18

Akumulasi Penyusutan Aset

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Aset Tahun 2015	Nilai Sisa Aset Tahun 2014
A.	Peralatan Dan Mesin	26.993.731.522,00	22.524.319.806,10	4.469.411.715,90	3.541.834.648,00
1.	Alat-alat Besar	4.065.823.260,00	3.390.848.260,00	674.975.000,00	-
2.	Alat-alat Angkut	3.879.024.111,00	2.124.994.097,00	1.754.030.014,00	1.372.725.778,00
3.	Alat-alat Bengkel	112.499.000,00	30.357.700,00	82.141.300,00	75.786.100,00
4.	Alat-alat Pertanian	3.148.000,00	3.148.000,00	-	-
5.	Alat-alat Kantor Dan R T	17.497.105.630,00	15.703.827.904,50	1.793.277.725,50	1.900.763.230,00
6.	Alat-alat Studio Dan Komunikasi	1.340.711.162,00	1.195.703.285,60	145.007.876,40	166.427.340,00
7.	Alat-alat Laboratorium	95.420.359,00	75.440.559,00	19.979.800,00	26.132.200,00
B.	Gedung dan Bangunan	22.436.404.317,00	8.405.738.338,88	14.030.665.978,12	13.653.959.773,79
1.	Bangunan Gedung	22.093.523.647,00	8.364.530.226,89	13.728.993.420,11	13.470.493.001,05
2.	Monumen	342.880.670,00	41.208.111,99	301.672.558,01	183.466.772,74

C.	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	196.700.000,00	58.267.500,00	138.432.500,00	144.350.000,00
1.	Bangunan Air/Irigasi	180.000.000,00	49.500.000,00	130.500.000,00	136.000.000,00
2.	Jaringan	16.700.000,00	8.767.500,00	7.932.500,00	8.350.000,00
	Jumlah	49.626.835.839,00	30.988.325.644,98	18.638.510.194,02	17.340.144.421,79

3.2.7 Pencatatan Jurnal Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Pencatatan Jurnal Belanja Modal dengan menggunakan data anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2015.

Tabel 3.19

Proporsi Belanja Modal TA 2015

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	2.794.850.000	2.552.266.650	91.32
Belanja Gedung dan Bangunan	1.174.792.000	868.685.800	73.94
Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.024.250.000	1.008.920.000	98.50
Jumlah	4.993.892.000	4.429.872.450	88.71

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 868.685.800,-

Piutang dari KUN Rp. 868.685.800,-

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap:

Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan Rp. 868.685.800,-

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 868.685.800,-

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.552.266.650,-

Piutang dari KUN Rp. 2.552.266.650,-

Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap:

Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan Rp. 2.552.266.650,-

Diinvestasikan dalam Aset Rp. 2.552.266.650,-

3. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya Rp. 1.008.920.000,-

Piutang dari KUN Rp. 1.008.920.000,-

Tidak dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap, tetapi akan dilakukan melalui Jurnal Aset sesuai dengan aset yang dihasilkan.